

POHON KINERJA (*CASCADING*)

TAHUN 2021-2026

Pemerintah Kabupaten
Halmahera Utara



DINAS
KOPERASI DAN
USAHA KECIL
MENENGAH

Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1 A, Desa MKCM,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,
Maluku Utara

VISI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat halmahera utara melalui pembangunan berkelanjutan dengan inovasi dan investasi dalam kebersamaan yang berkeadilan

MISI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Misi 3

Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi

Tujuan

Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas

1. Persentase koperasi bersertifikat NIK;
2. Pertumbuhan Anggota Koperasi;
3. Persentase UMKM memiliki NIB



Eselon II

Sasaran I:

Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan koperasi dan UKM

1. Persentase koperasi sehat
2. Pertumbuhan jumlah koperasi
3. Jumlah UMKM
4. Persentase UMKM yang memiliki standarisasi produk

Eselon III

Program:

1. Pelayanan izin usaha simpan pinjam
2. Pendidikan dan latihan perkoperasian
3. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
4. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
5. Program pengembangan UMKM
6. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
7. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

1. Persentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti/selesaikan
2. Persentase koperasi aktif
3. Pertumbuhan volume usaha koperasi
4. Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro
5. Perkembangan jumlah UMKM
6. Persentase koperasi aktif yang diawasi
7. Persentase koperasi sehat

Eselon IV

Kegiatan:

1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
2. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
3. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
4. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
5. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
6. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota
7. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
3. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
4. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
5. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
6. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
7. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
8. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota
9. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota
10. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota
11. Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota

Indikator kegiatan:

1. Persentase koperasi yang telah memiliki ijin usaha simpan pinjam
2. Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan
3. Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi
4. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
6. Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya
7. Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya

Indikator sub kegiatan:

1. Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
2. Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
3. Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM
4. Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
5. Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro
6. Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
7. Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
8. Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota
9. Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja
10. Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan
11. Jumlah koperasi yang mendapatkan

Eselon II

Sasaran II:

Meningkatnya kualitas kinerja dinas koperasi dan ukm

1. Nilai sakiip Diskop dan UKM

Eselon III

Program:

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah

Eselon IV

Kegiatan:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
8. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
10. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triulunan/semesteran SKPD
11. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
12. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16. Fasilitasi kunjungan tamu
17. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
18. Penyediaan jasa surat menyurat
19. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
20. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
21. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator kegiatan:

1. Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah
2. Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah
3. Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Cakupan administrasi umum perangkat daerah
5. Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator sub kegiatan:

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil
3. Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
5. Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Tersedianya laporan evaluasi kinerja bulanan / triulunan
8. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
9. Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
10. Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
11. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut
12. Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
13. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
14. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
15. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
16. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
17. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
18. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
19. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan
20. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
21. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
22. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara